



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 dilakukan secara serentak. Kebijakan tersebut berlaku bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya akan selesai pada tahun 2017. Sebanyak 101 daerah akan mengikuti Pilkada serentak yang terdiri dari tujuh provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang mengikuti Pilkada serentak tahun 2017 (Liputan 6, 2016, para 1).

DKI Jakarta adalah Ibukota Indonesia, hal tersebut menjadikan Pilkada DKI Jakarta mendapat banyak sorotan media. Menguatkan pernyataan tersebut, DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan Indonesia yang seluruh aktivitas kenegaraan berpusat di DKI Jakarta. Selain itu, DKI Jakarta juga termasuk salah satu daerah yang diberikan otonomi khusus yang diatur di dalam undang-undang (UU No. 29 Tahun 2007).

Alur Pilkada DKI Jakarta dimulai dengan pengumpulan syarat dukungan perseorangan yang dilaksanakan pada 3 Agustus - 7 Agustus 2016. Syarat tersebut diperuntukan bagi pasangan calon independen yang tidak didukung oleh partai politik (Ferdinan, 2016, para. 1). Kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran calon pada tanggal 19 September - 21 September 2016.

KPU DKI Jakarta menetapkan masa kampanye dan debat politik jatuh pada 26 Oktober 2016 - 11 Februari 2017. Kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan memengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan (Heryanto, 2013, h. 21).

Rangkaian selanjutnya adalah masa tenang, hari pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi suara, dan penetapan calon terpilih tanpa sengketa. Rentang waktu rangkaian tersebut terhitung sejak 12 Februari - 10 Maret 2017 (Sari, 2016, para. 10).

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 36 ayat 2 menyebutkan bahwa, jika tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka diadakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh dua pasangan calon yang memiliki nilai suara terbanyak pada putaran pertama (Purnamasari, 2017, para. 11).

Pada putaran kedua, masa kampanye jatuh pada tanggal 7 Maret - 15 April 2017. Sedangkan 16 - 18 April merupakan masa tenang dan berhentinya kegiatan kampanye dalam bentuk apapun. Dilanjutkan dengan hari pemungutan suara pada 19 April 2017. Penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur ada pada tanggal 5-6 Mei 2017 (Sari, 2017, para. 5).

Ada tiga pasangan yang mendaftarkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta, salah satunya adalah pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang menjabat pada tahun 2012. Pada tahun 2014, Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Joko Widodo yang terpilih sebagai presiden Republik Indonesia.

Sejak awal kemunculannya Ahok seringkali menuai kontroversi, baik dari kebijakan yang dibuat, sikap, maupun dari agama dan etnis yang dimiliki. Hal tersebut membuat nama Ahok kerap kali menghiasi media massa. Ahok kembali menjadi topik hangat saat dirinya dinyatakan melakukan penistaan agama saat menyampaikan pidatonya di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Dalam pidatonya Ahok mengatakan kalimat yang dianggap melecehkan ayat Al-Quran. Berikut adalah potongan pidato yang disampaikan oleh Ahok di Kepulauan Seribu (Iqbal, 2016, para 4).

“Bapak Ibu nggak bisa pilih saya, karena dibohongin pakai Surat Almaidah 51 macem-macem itu. Itu hak bapak ibu ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, nggak apa apa. Karena ini kan hak pribadi bapak ibu. Program ini jalan saja. Jadi bapak ibu ga usah merasa ga enak. Dalam nuraninya ga bisa pilih Ahok.”

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan Ahok pada 28 September 2016 ke Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta, karena pidatonya dianggap telah melecehkan surat Al-Maidah ayat 51 (Aziza, 2016, para 1-2).

Tak sampai disitu, pada tanggal 6 Oktober 2016, ACTA kembali melaporkan Ahok ke Bareskrim Polri atas tuduhan penistaan agama

(Kholid, 2016, para 1). Tidak sedikit juga para pemuka dan aktivis agama Islam yang ikut melaporkan Ahok ke jalur hukum.

Tidak puas dengan jalur hukum, sebagian masyarakat Indonesia yang beragama Muslim, akhirnya melakukan demo pada tanggal 4 November. Demonstran yang hadir pada demo tersebut diperkirakan berjumlah 50.000-200.000 orang, menuntut agar Presiden menetapkan Ahok sebagai tersangka terkait kasus penistaan agama. Demo solidaritas umat Muslim ini berakhir ricuh dengan aparat yang bertugas, sehingga menimbulkan beberapa orang terluka (Liputan 6, 2016, para 6-9).

Pihak kepolisian akhirnya menetapkan Ahok sebagai tersangka pada tanggal 16 November 2016. Tim penyidik menilai kasus ini layak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Ahok dikenai UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Alivionitasari, 2016, para 2-3).

Sidang perdana kasus penistaan agama tersebut dilakukan pada 13 Desember 2016 dan masih terus berlanjut hingga penelitian ini dibuat.

Dengan adanya kasus penistaan agama tersebut, nama Ahok tidak pernah berhenti muncul dalam pemberitaan di media massa. Diperkuat dengan adanya pilkada DKI Jakarta, tuduhan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok disebut sebagai salah satu bentuk *black campaign* yang dilakukan oleh pasangan calon (paslon) tertentu (Amelia, 2016, para 12-13).

Di tengah segala bentuk isu yang tengah menerpa, Ahok dan pasangannya tidak gentar dan tetap mengikuti proses Pilkada DKI 2017 sampai pada hari pemungutan suara, yakni 15 Februari 2017. Di hari pemilihan ada lima Lembaga Survei yang melakukan *quick count* dan hasilnya menunjukkan bahwa pasangan Ahok-Djarot menempati peringkat pertama, dan disusul dengan pasangan Anies-Sandiaga (Putera, 2017, para. 4-8).

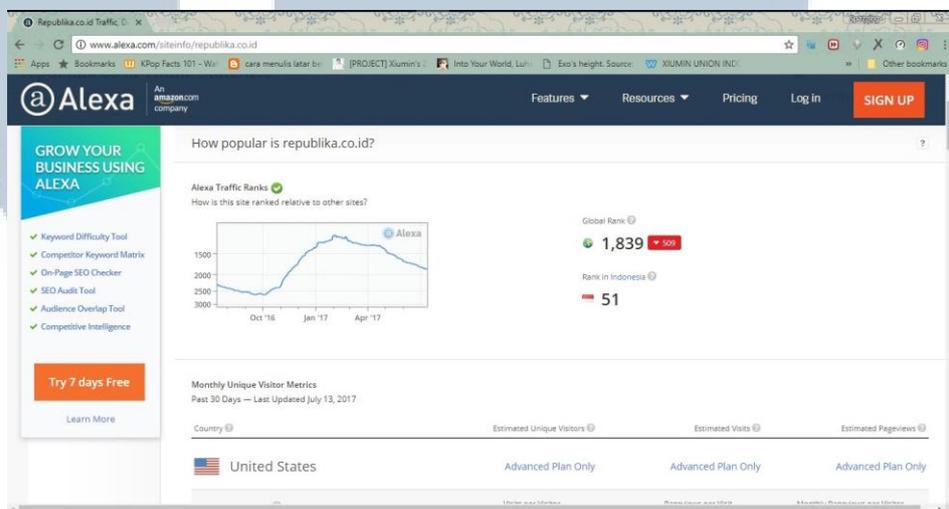
Seperti membenarkan hasil *quick count*, pada tanggal 4 Maret 2017, KPU DKI Jakarta mengumumkan bahwa pasangan calon Ahok-Djarot dan Anies-Sandiaga resmi masuk ke dalam pemilihan putaran kedua. Pasangan Ahok-Djarot unggul dengan perolehan suara sebesar 42,99 persen (Ramdhani, 2017, para. 4-5). Karena hasil jumlah suara masing-masing dari pasangan calon tidak ada yang mencapai 50%, maka KPU DKI Jakarta memutuskan untuk mengadakan pemilihan putaran kedua.

Media *online* Republika merupakan salah satu dari sekian banyak media *online* yang turut memberitakan Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. Dalam kumpulan berita mengenai Pilkada DKI 2017, media *online* Republika tidak hanya memberitakan soal Basuki Tjahaja Purnama, tapi juga dari sisi lawan yakni, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Republika sendiri sangat identik dengan media yang berideologi Islam, hal tersebut dikarenakan Republika dilahirkan oleh salah satu komunitas muslim yang ada di Indonesia (Hamad, 2004, h. 122). Republika

merupakan salah satu media massa yang juga terintegrasi dengan internet. Pada tahun 1995 surat kabar Republika resmi membuka media *online*, yakni Republika.co.id (Republika, 2017). Saat ini media *online* Republika menempati peringkat ke 51 dari 500 situs populer di Indonesia (Alexa, 2017).

Gambar 1.1 Ranking Media *Online* Republika di *website* Alexa



Sumber: Alexa.com, diakses 10 Juli 2017

Surat kabar Republika terbukti tidak objektif karena tidak mampu memenuhi unsur keseimbangan dan netralitas. Sumartono (2006) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa saat terjadi konflik di wilayah Ambon yang melibatkan antara kelompok agama Islam dan agama Kristen, surat kabar Republika terlihat lebih memihak pada umat Islam. Oleh karena itu, pemberitaan media yang memiliki ideologi islam menarik untuk diteliti objektivitasnya.

Objektivitas dalam pelaporan berita bertujuan untuk membuktikan profesionalisme wartawan dalam melayani publik (Ardianto, 2007, h. 206). Objektivitas dapat diukur melalui dua dimensi besar yaitu, faktualitas dan Imparsialitas (Siahaan, 2001, 63). Objektivitas juga di atur dalam kode etik jurnalistik yang dikeluarkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada pasal 5 yang mengatakan bahwa wartawan Indonesia harus menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta tidak mencampur adukkan fakta dan opini sendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengukur tingkat objektivitas pemberitaan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilkada DKI 2017 di media *online* yang berideologi Islam, yakni Republika.co.id.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik perumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana objektivitas media *online* [Republika](http://Republika.co.id) saat memberitakan Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilkada DKI Jakarta 2016?

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana objektivitas media *online* Republika saat memberitakan Basuki Tjahaja Purnama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai bagaimana objektivitas pemberitaan suatu media yang memiliki kepentingan akan suatu kelompok, dan juga media yang memiliki ideologi keagamaan tertentu, dengan menggunakan konsep objektivitas Westerstahl. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu bagi pihak yang ingin melakukan penelitian sejenis, atau melakukan pengembangan penelitian.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Republika untuk mengetahui bagaimana pemberitaan yang mereka lakukan selama masa kampanye putaran kedua Pilkada DKI Jakarta sampai pada hari pemungutan suara. Selain itu, penelitian ini dapat berperan sebagai alat kontrol, agar dapat meningkatkan praktik jurnalisme yang objektif.